

**EKSISTENSI KOMISIONER PEREMPUAN
DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

TESIS



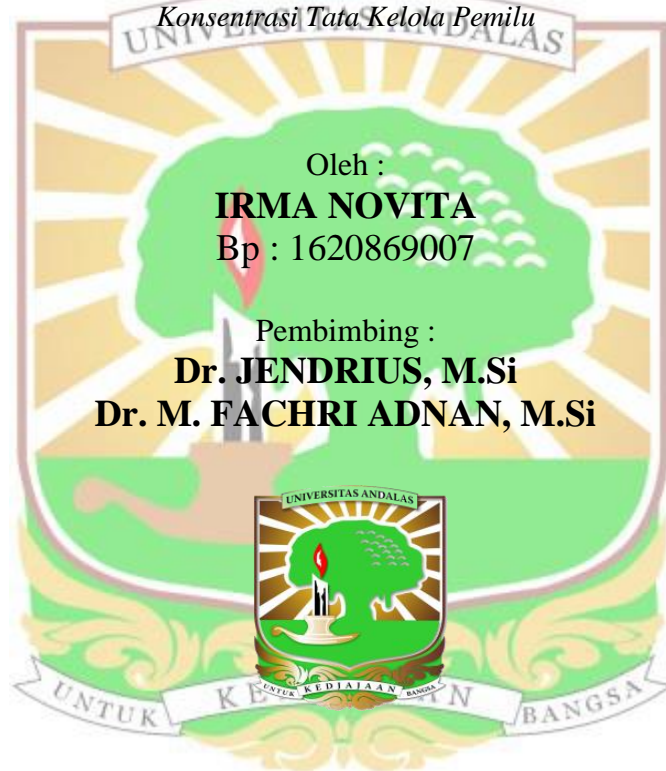
**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**EKSISTENSI KOMISIONER PEREMPUAN
DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Sciences*

Konsentrasi Tata Kelola Pemilu



**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

EKSISTENSI KOMISIONER PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA BARAT

Oleh : IRMA NOVITA (1620869007)
(Dibawah bimbingan : Dr. Jendrius, M.Si dan Dr. M. Fachri Adnan, M.Si)

Abstrak

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Eksistensi perempuan dalam bidang kepegiluan bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Eksistensi perempuan sebagai penyelenggara pemilu ini akan memainkan peran utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh komisioner perempuan ini pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis dan lebih terwakili.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta peluang dan tantangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menekankan pada aspek gender lebih tepatnya adalah penelitian feminis (*feminisme research*) yang berfokus pada pengalaman dan kehidupan perempuan dalam rangka memahami perilaku sosial yang ada serta dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang relevan dengan analisa yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam eksistensi komisioner perempuan pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Fakta di lapangan masih terjadi ketimpangan gender dalam komposisi struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Komisioner perempuan ini masih sangat minim secara kuantitatif akibat belum terpenuhinya kuota 30 %. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar komisioner perempuan ini merasakan masih ada diskriminasi dan ketidakadilan gender serta masih banyak hambatan dan tantangan yang ditemukan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan kesempatan perempuan terbatas dalam menjalankan tugas-tugas kepegiluan.

Bentuk eksistensinya diwujudkan melalui peran-perannya sebagai anggota KPU sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka dalam divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing yang sudah mulai sadar dan paham serta sudah mulai sensitif dan proaktif dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki juga masih terasa dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Selain itu faktor *stereotype*, *marjinalisasi*, *subordinasi*, serta *double burden* juga masih sangat mempengaruhi eksistensi komisioner perempuan ini dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Kata Kunci : Eksistensi, Perempuan, Komisi Pemilihan Umum, Kesetaraan Gender

**THE EXISTENCE OF WOMEN COMMISSIONERS
IN MAKING GENDER EQUALITY
AT THE COMMISSION OF GENERAL ELECTIONS OF PROVINCE
AND DISTRICT/CITY IN WEST SUMATERA**

By : IRMA NOVITA (1620869007)
(Supervised by : Dr. Jendrius, M.Si and Dr.M.Fachri Adnan, M.Si)

Abstract

The institution of election organizers such as the General Election Commission is tasked with implementing the electoral stages process. Placing women in the election field is not only a matter of equality with men but part of the effort to encourage women's political participation. The involvement of women as election organizers will play a major role in maximizing women's participation in the elections. The main act women can take as election organizers at each stage is to ensure that women's needs are considered and incorporated into programs or policies that are properly designed and implemented. The results of the number of women commissioners as election organizers are still minimal quantitatively. And if you look at the composition of the current membership structure, this women commissioner is still very minimal due to the 30 percent quota has not been fulfilled so there is still discrimination and many obstacles and challenges are found in realizing gender equality and women's opportunities are limited in performing the tasks of elections. The research method used in this study is qualitatively emphasizes a gender aspect, more precisely, feminist research, which focuses on the experience and life of women in order to understand existing social behavior as well as by using secondary data sources relevant to the analysis that will be conducted to find out and analyze the existence of inequities gender in the existence of female commissioners at the provincial and district/city electoral commissions in West Sumatera. Most of these commissioners also feel there is still gender inequality. Challenges and obstacles such as social barriers in the form of patriarchal culture that still exist in Minangkabau society are still felt even though it is not as thick as in past times. In addition, stereotypes, marginalization, subordination, and the double burden also greatly affect the existence of this women commissioner in realizing gender equality.

Keywords: *Existence, Women, Gender Equality, Election Commission*